



Peran KRI Dr Wahidin Sudirohusodo sebagai Unsur SAR, Evakuasi VVIP dan Evakuasi Medis dalam Rangka Operasi Militer selain Perang di Laut Maritim Indonesia

Riska Sayogo Wicaksono¹, Rudi Harto², Juli Herman³

^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: sayogo52@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01 Keywords: Dr. Wahidin Sudirohusodo; Military Operations Other Than War.	Not a few disasters in Indonesia have occurred due to volcanic eruptions which have resulted in landslides, earthquakes and the most severe is tsunami. This makes the state have to try as much as possible in thinking about how the government can evacuate the disaster victims from the threat of natural disasters that hit them, especially residents on the coast far from hospitals or cities. Thus, to overcome the problem of evacuating areas that are not reached by hospitals, the government has made a warship at the PT PAL Surabaya shipyard named KRI dr. VVIP and medical evacuation. Therefore this journal will provide an understanding to the public that Indonesia already has a KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo as an auxiliary KRI that functions as SAR, VVIP Evacuation and medical evacuation due to disasters which can be utilized as much as possible by the government in providing support to the community related to health services. The method of making this journal uses a qualitative library research method (library). According to the results of this journal, the procurement of KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo's defense equipment has had a positive impact, especially for residents who live far from medical reach.
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01 Kata kunci: Dr Wahidin Sudirohusodo; Operasi Militer selain Perang.	Abstrak Tidak sedikit bencana di Indonesia terjadi disebabkan oleh letusan gunung merapi yang mengakibatkan tanah longsor, gempa bumi dan yang paling parah adalah tsunami. Hal ini membuat negara harus berusaha semaksimal mungkin dalam memikirkan bagaimana cara pemerintah dapat mengevakuasi korban-korban bencana tersebut dari acaman bencana alam yang menimpahnya, terlebih penduduk pinggir pantai yang jauh dari rumah sakit ataupun perkotaan. Dengan demikian untuk mengatasi masalah evakuasi daerah yang tidak terjangkau oleh rumah sakit, pemerintah telah membuat sebuah kapal perang di galangan PT PAL Surabaya yang diberi nama KRI dr Wahidin Sudirohusodo dengan nomor lambung 991 dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai unsur SAR, evakuasi VVIP dan evakuasi medis. Oleh karena itu jurnal ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Indonesia telah memiliki KRI dr Wahidin Sudirohusodo sebagai KRI bantu yang berfungsi sebagai SAR, Evakuasi VVIP dan evakuasi medis akibat bencana yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat terkait dengan layanan kesehatan. Adapun metode pembuatan jurnal ini menggunakan metode kualitatif <i>library research</i> (pustaka). Menurut hasil jurnal ini bahwa adanya pengadaan alutsista KRI dr Wahidin Sudirohusodo memberikan dampak yang positif khususnya bagi warga penduduk yang bertempat tinggal jauh dari jangkauan medis.

I. PENDAHULUAN

Secara geografis, posisi Kepulauan Indonesia sangat strategis yaitu terletak diantara 2 benua (Benua Asia dan Benua Australia) serta 2 samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik). Secara geologis Kepulauan Indonesia berada pada jalur penunjaman lempeng bumi, seperti penunjaman Lempeng Samudra Indo-Australia dengan Lempeng Benua Eurasia yang memanjang dari pantai barat Sumatera hingga pantai selatan Jawa terus ke Timur sampai Nusa Tenggara. Adanya proses penunjaman ini Kepulauan Indonesia terdapat deretan gunung

api terutama dari Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara akibatnya dapat memberikan keuntungan bagi tanah disekitarnya menjadi subur dan produktif. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa adanya gunung api yang masih aktif memberikan suatu signal bahaya akan letusan gunung api sehingga perlu diwaspadai.

Tidak sedikit bencana di Indonesia terjadi karena akibat letusan gunung merapi yang mengakibatkan tanah longsor, gempa bumi dan yang paling parah adalah tsunami. Hal ini membuat negara harus berusaha semaksimal mungkin dalam memikirkan bagaimana caranya

pemerintah dapat mengevakuasi korban - korban bencana tersebut dari acaman bencana alam yang menimpahnya, terlebih penduduk pinggir pantai yang jauh dari rumah sakit ataupun perkotaan. Salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan dalam pembinaan pertahanan negara adalah kondisi obyektif negara dan bangsa Indonesia dalam memberikan keamanan dan keselamatan segenap bangsa. Faktor ini menyangkut demografi, potensi sumber alam, serta posisi geografis dengan karakter wilayah Indonesia, yang kesemuanya mempunyai arti yang sangat penting dan bahkan menentukan makna strategisnya. Faktor ini bisa dinamakan geostrategis. Konsep geostrategis berpendirian bahwa letak wilayah suatu negara dengan segala dimensinya, menjadi penentu kekuatan militer dan juga kekuatan politik negara tersebut. Penguasaan terhadap daerah yang letaknya strategis dalam percaturan dunia merupakan faktor penting supaya sebuah negara secara efektif mampu mempengaruhi, menguasai atau mempertahankan penguasaannya terhadap wilayah lain.

Semua mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim yang memiliki kompleksitas geografis dan sosial-budaya yang luar biasa. Fakta itu masih ditambah dengan kenyataan geopolitik lain, yaitu bahwa negara yang multi-plural ini berada pada persimpangan lalu lintas dunia, khususnya lalu lintas komunikasi maritim yang sangat penting. Dengan demikian untuk mengatasi masalah evakuasi daerah yang tidak terjangkau oleh layanan medis atau rumah sakit, pemerintah telah membuat kapal perang di galangan PT PAL Surabaya yang diberi nama dr Wahidin Sudirohusodo dengan nomor lambung 991 yang berfungsi sebagai SAR, evakuasi VVIP dan evakuasi medis.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode pembuatan jurnal ini menggunakan metode kualitatif *library research* (penelitian pustaka). Menurut Raico (2010) yang disebut dengan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan pendekatan mengeksplorasi dalam memahami suatu gejala yang sentral. Adapun keunggulan pada metode ini adalah metode kualitatif ini dapat memberikan kejelasan mengenai gambaran suatu permasalahan terhadap fakta dilapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Operasi Militer Selain Perang di Laut Maritim Indonesia

Pertahanan negara adalah pembelaan terhadap negara dengan tujuan menciptakan ketentraman dalam bangsa. Menurut ahli yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dari bentuk ancaman maupun gangguan dari luar (Conni Rahakundini Bakrie, 2007). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 1 ayat 5 menjelaskan, yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan pelaksanaan pertahanan negara telah menjadi amanah dari Pancasila yang telah lebih dulu ada sebelum dibentuknya negara Indonesia, amanah tersebut terdapat dalam nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan pada UUD NRI 1945, TAP MPR, UU, PP dan PERMENHAN. Sehingga yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah upaya mempertahankan negara dari ancaman luar maupun dari dalam negara dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki guna sebagai perjuangan atas hak yang dimilikinya.

Tujuan dari pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi seluruh isi dari kedaulatan pertahanan negara, menjaga dan melindungi keutuhan wilayah NKRI serta menjaga dan melindungi segenap komponen bangsa dari segala bentuk ancaman dari dalam maupun gangguan dari luar. Selain itu detail dari tujuan pertahanan negara terdapat dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan dalam buku putih pertahanan tahun 2015 menjelaskan bahwa fungsi dari pertahanan yaitu untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan negara, melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta mewujudkan stabilitas keamanan nasional baik dari

ancaman luar maupun dalam negeri. Adapun tugas dari TNI dalam mempertahankan sebuah negara adalah salah satunya dapat melaksanakan operasi non militer demi menjaga keamanan dan pertahanan sebuah negara yang dikenal dengan operasi OMSP, beberapa tugas pokok TNI dalam undang-undang terkait dengan OMSP adalah:

1. Mengatasi gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata
2. Mengatasi aksi terorisme dan mengamankan wilayah perbatasan
3. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
4. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
5. Membantu tugas pemerintah di daerah
6. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan
7. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search dan rescue*)

TNI terintegrasi dengan mitra antar instansi dan lembaga dalam berbagai operasi militer maupun non militer, kerjasama tersebut terjalin baik dengan pusat maupun dengan daerah, hal tersebut semata-mata untuk memajukan dan mempertahankan kepentingan nasional dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan nasional melalui kekuatan militer. Selain itu TNI juga dituntut untuk mahir dalam segala hal salah satunya dalam evakuasi bencana menggunakan alutsista yang sudah melekat pada dirinya, hal ini sesuai dengan tugas TNI dalam OMSP. Berkaitan dengan tugas TNI dalam OMSP tentunya program pemerintah tersebut harus dapat diselenggarakan oleh TNI bersama dengan kementerian atau lembaga lain sesuai dengain fungsinya. TNI yang memiliki unsur perencanaan dan kekuatan tentunya dapat mengambil bagian untuk menjalankan program pemerintah pada misi kemanusiaan yang sangat erat kaitannya dengan penanganan bencana alam di Indonesia.

Di dalam aturan perundang-undangan TNI terdapat kegiatan OMSP salah satunya adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan di darat, maupun di laut maritim Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang tidak semua wilayah bisa dijangkau oleh kendaraan darat. Dengan demikian angkatan bersenjata dapat menawarkan kemampuannya yang unik, terutama

dalam transportasi, logistik dan kemampuannya untuk memberikan bantuan secara cepat dan juga tepat kepada masyarakat yang membutuhkan sekalipun ke tempat yang sulit dijangkau (Army, 2011)

B. Spesifikasi Kapal Perang Indonesia dr Wahidin Sudirohusodo (991)

Kapal Perang Republik Indonesia yang kemudian disingkat (KRI) dr. Wahidin Sudirohusodo dengan nomor lambung 991 merupakan sebuah kapal bantu rumah sakit milik TNI Angkatan Laut Indonesia yang dibangun di galangan kapal dalam negeri (BUMN) oleh PT PAL di Surabaya. Kapal ini masuk dalam kapal Satban (satuan kapal bantu) TNI AL. Kapal rumah sakit ini memiliki dimensi dengan ukuran panjang 124 meter dengan ukuran lebar hingga 21.8 meter. Kapal ini mampu mengangkut personel sebanyak 643 orang termasuk dengan jumlah pasien sebanyak 159 orang. Kapal ini memiliki kecepatan maksimal yang mampu berlayar hingga mencapai 18 knot dan kecepatan ekonomis 12-14 knot dengan daya jelajah hingga 30 hari atau sejauh 10.000 mil laut. Pada tanggal 7 Januari 2021 dilaksanakan upacara peresmian dan pengukuhan Komandan KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (991) kepada Letkol Laut (P) Anang Setioko.

Adanya kemampuan dari kapal perang berupa rumah sakit dengan nomor lambung 991 (KRI dr. Wahidin Sudirohusodo) dapat membantu perbantuan evakuasi bencana alam di wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah 3 T (tertinggal, terpencil dan terluar) hal ini sesuai dengan tugas pokok TNI OMSP dalam Pasal 7 Permenhan Nomor 09 tahun 2011, yang menyatakan bahwa beberapa obyek penyelenggaraan bantuan TNI dibedakan berdasarkan 3 kategori, yaitu untuk bencana alam, pengungsi dan bantuan kemanusiaan. Dalam kategori bencana alam, TNI dapat diperbantukan untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, penanganan pengungsi dan pemulihan sarana dan prasarana umum.

Hal ini tentunya sangat membantu setiap wilayah 3T terlebih kekuatan dari kapal ini memiliki dimensi dengan ukuran panjang 124 meter dengan ukuran lebar hingga 21.8 meter dan tinggi kapal mencapai 6,7 meter. Kapal ini mampu mengangkut personel sebanyak 484 orang ditambah dengan jumlah pasien

sebanyak 159 orang, sehingga total personel yang mampu diangkutnya mencapai 643. Kapal ini memiliki kecepatan maksimal yang mampu berlayar hingga mencapai 18 knot dan kecepatan ekonomis 12 knot dengan daya jelajah hingga 30 hari atau sejauh 10.000 mil laut. Wilayah 3T merupakan wilayah tertinggal, terluar dan terpencil yang berada di wilayah perbatasan Indonesia, hal ini menjadikan jangkauan akses terhadap segala bentuk keperluan masyarakat yang ada di wilayah tersebut kurang mendapatkan perhatian. Jikalau ada bencana melanda akan mengakibatkan sulitnya akses untuk bisa menjangkaunya, sehingga evakuasi terhadap korban bencana alam menjadi terhambat dan hal ini tentunya mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuh.

Permasalahan pada daerah 3T bukan hanya pada aspek pendidikan saja, akan tetapi juga pada aspek proses evakuasi ketika terjadi suatu bencana di dekat wilayah laut. Wilayah laut yang jauh dari daratan akan menghambat proses evakuasi korban bencana, sehingga dimungkinkan dengan adanya pengadaan alutsista rumah sakit 991 ini diharapkan mampu menjadi terminimalisirnya korban bencana. Mengingat KRI Rumah Sakit 991 merupakan KRI yang berfungsi sebagai unsur SAR, evakuasi VVIP dan evakuasi medis yang dibuat oleh anak bangsa BUMN (PT PAL) terhadap TNI Angkatan Laut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adanya kemampuan dari kapal perang berupa kapal rumah sakit dengan nomor lambung 991 (KRI dr. Wahidin Sudirohusodo) dapat membantu perbantuan evakuasi bencana alam di wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah 3 T (tertinggal, terluar dan terpencil) hal ini sesuai dengan tugas pokok TNI OMSP dalam Pasal 7 Permenhan Nomor 09 tahun 2011. Mengingat KRI Rumah Sakit 991 merupakan KRI yang berfungsi sebagai unsur SAR, evakuasi VVIP dan evakuasi medis yang dibuat oleh anak bangsa BUMN (PT PAL) terhadap TNI Angkatan Laut. Adanya pengadaan alutsista KRI dr Wahidin Sudirohusodo memberikan dampak yang positif khususnya bagi warga penduduk yang bertempat tinggal jauh dari jangkauan medis di pesisir wilayah pantai.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Peran KRI Dr Wahidin Sudirohusodo sebagai Unsur SAR, Evakuasi VVIP dan Evakuasi Medis dalam Rangka Operasi Militer selain Perang di Laut Maritim Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhmad Pratama Putra, "Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai", Jurnal Penanggulangan Bencana, Vol. 2, No. 1, Tahun 2011, hlm.14.)
- Albi Anggoto dan Johan Setiawan, 2018 metodologi penelitian kualitatif, jejak: sukabumi, 8
- Episentrum (pusat gempa) yaitu titik tepat di permukaan bumi secara vertikal di atas hiposentrum (aitaiu fokus). Hiposentrum adalah titik di dalam bumi dimana gempa terjadi (USGS, 2013).
- International Convention for the Safe of Live at Sea (SOLAIS), 1974.
- International Aeronautical & Maritime Search and Rescue (IAIMSAIR) Manual, 1998. International Search and Rescue Advisory Group (INSAIRAIG) Guidelines and Methodology, 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Taihun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Taihun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan.
- Peraturan Presiden Nomor 99 Taihun 2007 tentang Badan SAIR Nasional.
- Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.14 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional.
- Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentaing Organisasi dan Tata Laksana Badan SAR Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014.

- Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2014.
- Sinergitas TNI dan BNPB Dalam Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Di Palu Gunai Meningkatkan Pertahanan Nirmiliter Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara Oleh Joni Sulistiawan, Ikhwan Syaihtairiai, Dohair Siaintur, Lukmain Yudho Praikoso, Herlinai Juni Rismai Sairaigh, Ernailem Baingun Republic Indonesia Of Defense University, Kawasan Ipsc Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810 Email: 1kaimailekumdeplek@gmail.com Vol.2 No.8 Januari 2022 Hal 2843
- Straitegi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan (Nairdisunairdi571@gmail.com AI_Aldriyainto@Yaihuo.Com Suhirwain@Idu.Aic.Id) Jurnal Straitegi Pertahanan Laut | Volume 6 Nomor 1 Taihun 2020 Hal 72
- The Convention on International Civil Aviation, 1944.
- Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang (UU) No. 24 Taihun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI